

INTERNALISASI

SUSTAINABLE LAND USE PLANNING

Tim Penulis

MUTMAINNAH

FITRIA NUR INDAH DJAFAR

IMRAN TOMURA

INTERNALISASI
*SUSTAINABLE LAND
USE PLANNING*

Mutmainnah
Fitria Nur Indah Djafar
Imran Tumora

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana
Pasal 113

1. Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan secara komersial dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara komersial dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara komersial dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)

INTERNALISASI
*SUSTAINABLE LAND
USE PLANNING*

Mutmainnah
Fitria Nur Indah Djafar
Imran Tumora



INTERNALISASI
SUSTAINABLE LAND USE PLANNING

Oleh:
Mutmainnah
Fitria Nur Indah Djafar
Imran Tumora

Tata letak dan desain sampul:
Andi Ferdhian Husain

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Copyright © 2025
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis

Diterbitkan oleh Penerbit Rumah Bunyi Kendari
Email : rumahbunyi bookstore@gmail.com
Telpon ; 085225890811

Edisi Pertama 2025
Halaman: iv-52
Ukuran : 14x21 cm
Poppins : 12 pts

ISBN : 978-623-6760-27-7



KATA PENGANTAR

Ucapan Puji Syukur atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberi kemampuan kepada penulis dalam menyusun Internalisasi *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) khususnya pada wilayah intervensi di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyusunan buku ini memberi gambaran tentang proses yang dilakukan pasca penyusunan dokumen SLUP, sebagai upaya dalam merealisasikan sebuah perencanaan pembangunan desa yang berlandaskan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan semua pihak menjadi kunci dalam mencapai tujuan disusunnya dokumen SLUP. Kami mendokumentasikan seluruh prosesnya dalam buku ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi parapihak, khususnya yang juga sedang mendorong implementasi sebuah perencanaan di tingkat desa.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, baik dalam rangkaian proses internalisasi serta dalam pendokumentasian internalisasi SLUP dalam sebuah buku.

Kendari, Januari 2025



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	01
	DAFTAR ISI	02
	LATAR BELAKANG	04
	RINGKASAN EKSEKUTIF	13
	TUJUAN UTAMA	15
A	INTERNALISASI REKOMENDASI SLUP DALAM PERENCANAAN DESA	16
	1. Diseminasi SLUP di tingkat kabupaten	17
	2. Diskusi terfokus terkait dengan pendekatan dalam menginternalisasi SLUP di tingkat desa Bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.	21
	3. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat desa untuk kegiatan sosialisasi hasil dan rekomendasi SLUP dalam rapat musrembangdesa	23
	4. Integrasi musrembangdesa dengan sosialisasi hasil rekomendasi slup untuk perencanaan desa	27



DAFTAR ISI

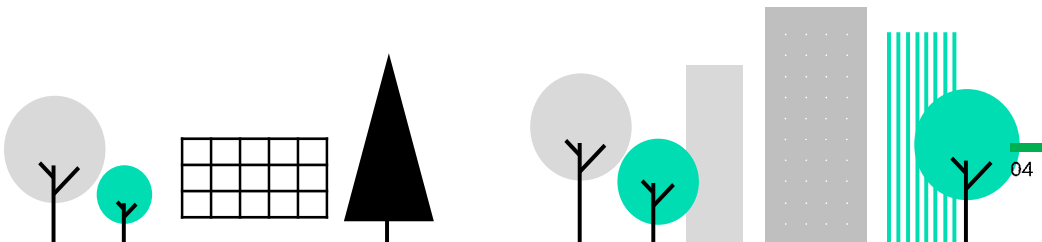
B	PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM INTERNALISASI SLUP	31
	1. Melakukan analisis dokumen SLUP dengan sudut pandang gender	32
	2. Diskusi Bersama tim penyusun SLUP	34
	3. Menentukan aspek gender yang dapat diinternalisasi ke dalam elemen SLUP	38
	4. Melakukan FGD di kampung untuk mengumpulkan data gender sesuai dengan elemen dalam SLUP	42
	5. Membuat laporan dan rekomendasi internalisasi aspek gender dalam penyusunan SLUP	49
	DAFTAR PUSTAKA	52

Sustainable Land Use Planning (SLUP) pada dasarnya merupakan proses perencanaan penggunaan lahan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam suatu wilayah.

SLUP mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketersediaan sumber daya alam, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan, sambil tetap menjaga aspek konservasi dan preservasi lingkungan.

Dengan pendekatan ini, SLUP berupaya menciptakan rencana penggunaan lahan yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan, sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

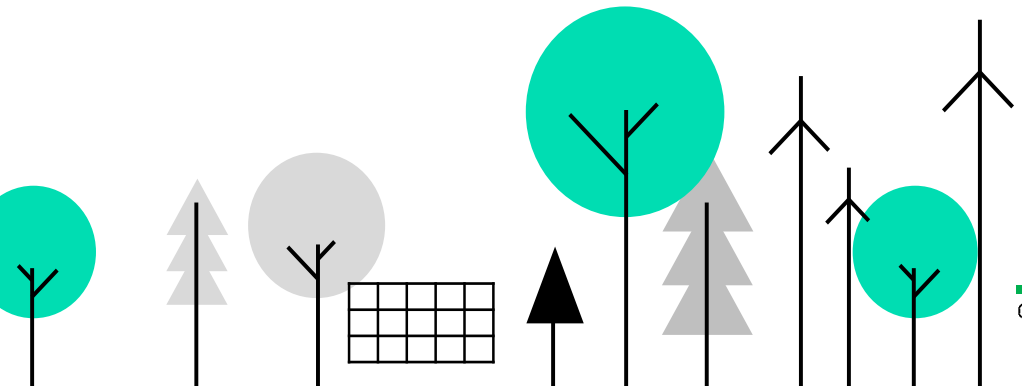
Fungsi utama dari SLUP adalah mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara optimal, memastikan bahwa lahan digunakan sesuai dengan kapasitas dan karakteristiknya.



Hal ini meliputi penetapan kawasan untuk berbagai fungsi, seperti pemukiman, pertanian, industri, dan konservasi. SLUP juga berperan dalam mencegah kerusakan lingkungan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap keputusan penggunaan lahan.

Selain itu, melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, SLUP dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri.

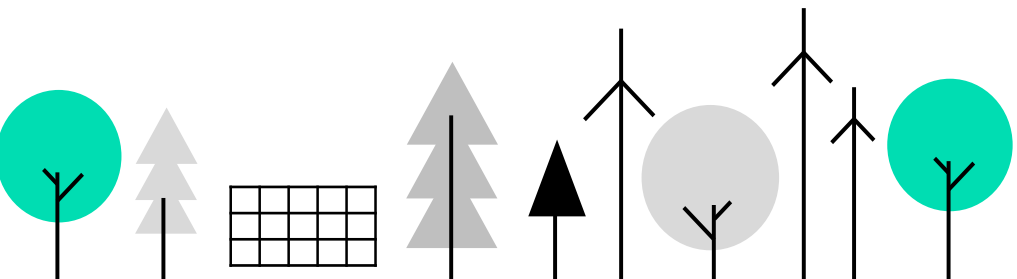
Dengan demikian, SLUP tidak hanya menjadi alat perencanaan tetapi juga sarana untuk memberdayakan komunitas lokal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.



Internalisasi dokumen hasil *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) di masing-masing desa merupakan langkah penting dalam mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. SLUP adalah pendekatan yang menekankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan lahan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem.

Dalam konteks ini, internalisasi dokumen SLUP memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.

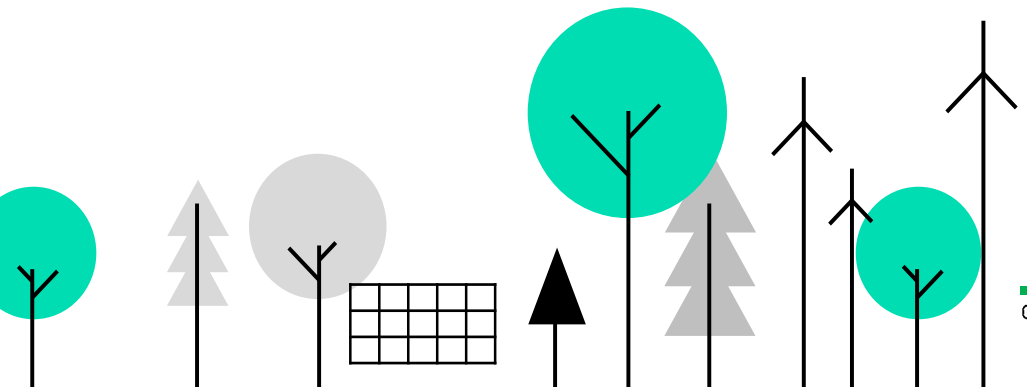
Internalisasi dokumen SLUP menjadi salah satu alat dalam memperkuat partisipasi Masyarakat desa. Kegiatan ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan lahan di desa mereka.



Dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek perencana, rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan akan meningkat, sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar dalam implementasi kebijakan dan program Pembangunan.

Disamping itu, melalui proses internalisasi, masyarakat desa dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip SLUP, termasuk analisis potensi lahan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Ini memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan terkait penggunaan lahan, seperti konflik agraria dan kerusakan lingkungan.

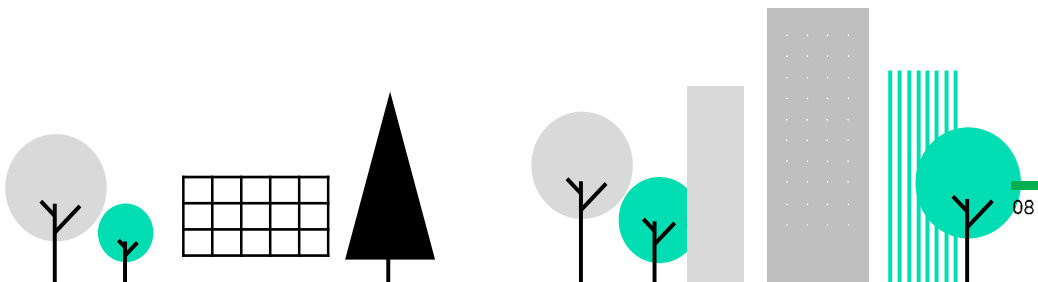


Dokumen SLUP yang terinternalisasi akan lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan spesifik desa.

Dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi setempat, perencanaan penggunaan lahan dapat disesuaikan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Internalisasi dokumen SLUP sejalan dengan upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusi sosial.

Internalisasi dokumen hasil SLUP di masing-masing desa bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

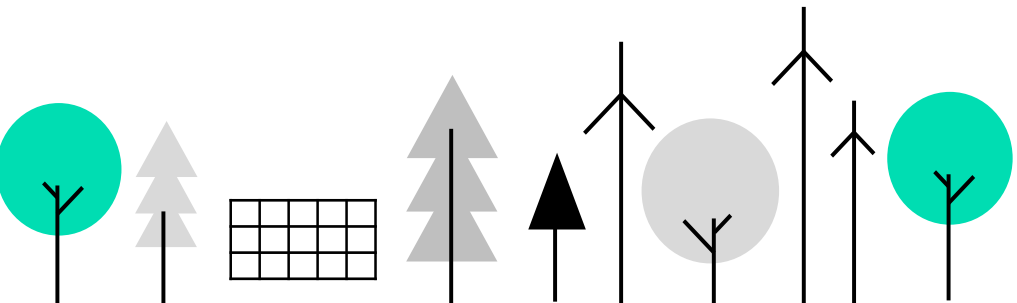


Internalisasi dokumen hasil SLUP di masing-masing desa bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi, desa-desa dapat menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Untuk mendukung internalisasi SLUP yang lebih meluas, maka buku internalisasi SLUP menjadi penting untuk menjadi pegangan dasar bagi organisasi atau pemerintah yang akan melakukan internalisasi SLUP di wilayahnya masing-masing.

Namun tentu saja buku ini menjadi salah satu alat belajar yang belum sempurna, sehingga pengaplikasian internalisasi SLUP tetap harus mengedepankan konteks kewilayahan.

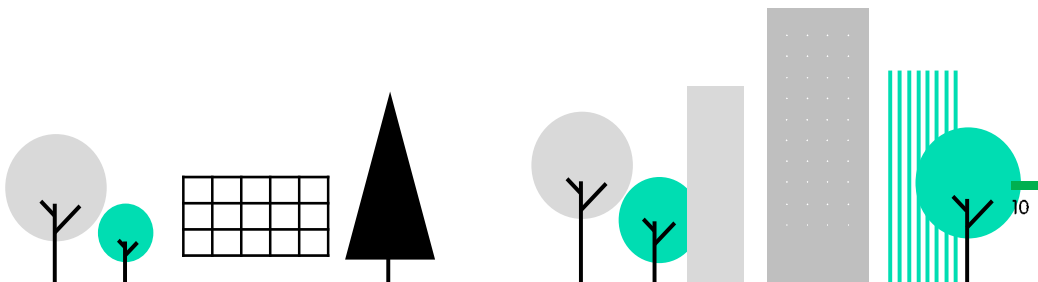


Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan adil menjadi semakin krusial.

Namun, sering kali dalam proses perencanaan penggunaan lahan, perspektif gender diabaikan, sehingga mengakibatkan ketidakadilan yang merugikan kelompok tertentu, terutama perempuan.

Perempuan, yang sering kali merupakan pengelola utama sumber daya alam di banyak komunitas, menghadapi berbagai hambatan dalam akses dan kontrol terhadap lahan dan sumber daya lainnya.

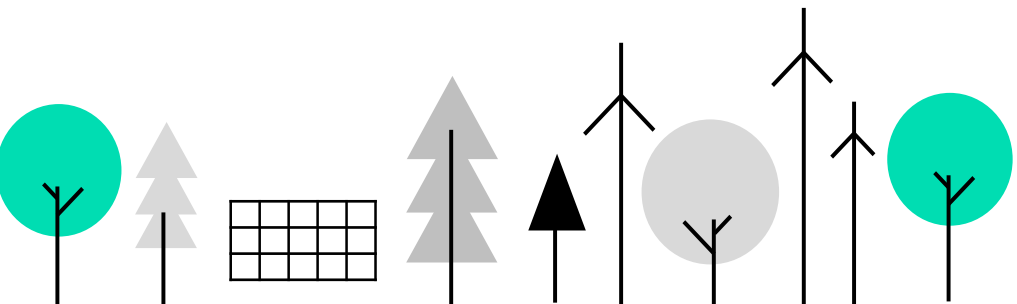
Hal ini disebabkan oleh norma sosial dan budaya yang mendiskriminasi serta ketidaksetaraan struktural yang telah berlangsung lama.



Internalisasi gender dalam dokumen *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) kemudian juga menjadi satu isu yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan suara dan kebutuhan laki-laki, tetapi juga memperhatikan aspirasi perempuan.

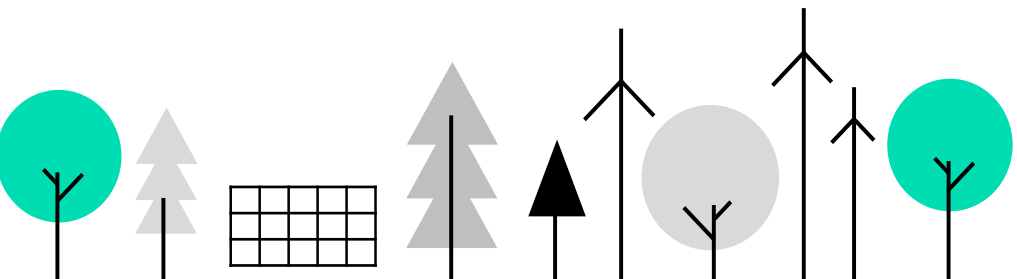
Dengan mengintegrasikan perspektif gender, kita dapat mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh perempuan dalam pengelolaan lahan, seperti hak atas tanah, akses terhadap kredit, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Ini tidak hanya akan meningkatkan keadilan sosial tetapi juga memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan.



Lebih jauh lagi, melibatkan perempuan dalam proses perencanaan tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka secara individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, hasilnya cenderung lebih berkelanjutan dan inklusif.

Dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam perencanaan penggunaan lahan, kita tidak hanya memberdayakan mereka tetapi juga mendorong terciptanya solusi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.



Internalisasi *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) merupakan proses penting dalam perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

SLUP bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya alam dan kebutuhan masyarakat lokal.

Proses internalisasi dokumen SLUP di tingkat desa menjadi langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Buku ini menjelaskan tujuan utama dari internalisasi SLUP, yang mencakup integrasi prinsip keberlanjutan dalam perencanaan desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Diseminasi hasil SLUP di tingkat kabupaten merupakan tahap awal yang penting, di mana pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilibatkan untuk menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.



Selain itu, diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa membantu mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan dalam implementasi SLUP di tingkat desa. Internalisasi gender dalam SLUP juga menjadi fokus utama, di mana pentingnya perspektif gender diintegrasikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan.

Proses analisis dokumen SLUP dengan sudut pandang gender dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui kegiatan FGD, data gender yang relevan dikumpulkan untuk merumuskan rekomendasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender.

Akhirnya, laporan dan rekomendasi terkait internalisasi aspek gender dalam penyusunan SLUP disusun untuk memastikan bahwa semua temuan dan analisis terdokumentasi dengan baik, serta diintegrasikan ke dalam kebijakan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

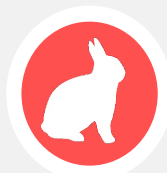
Dengan demikian, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam proses internalisasi SLUP, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

TUJUAN UTAMA

Dengan adanya internalisasi SLUP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran awal proses yang dilalui dalam serial internalisasi SLUP di suatu desa.

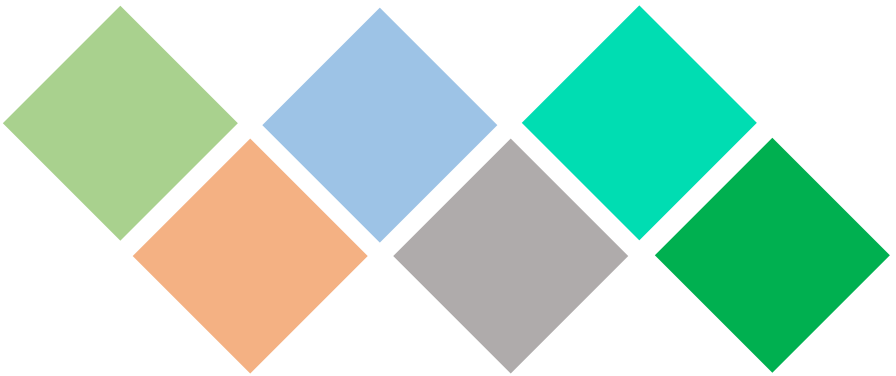
Dengan terinternalisasinya dokumen SLUP di masing-masing desa, diharapkan terjadinya integrasi antara prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan desa yang telah termuat dalam dokumen SLUP.

Selain itu, tujuan akhir dari internalisasi SLUP adalah untuk mendukung Tercapainya peningkatan Kualitas hidup masyarakat serta perlindungan lingkungannya.





**INTERNALISASI REKOMENDASI SLUP
DALAM PERENCANAAN DESA**



1. DISEMINASI SLUP DI TINGKAT KABUPATEN

Tahap awal yang dilakukan setelah dokumen SLUP desa dirampungkan adalah diseminasi hasil. Pada tahapan ini, diseminasi dilakukan di tingkat kabupaten terlebih dahulu dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, utamanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam proses ini bertujuan agar adanya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga rencana yang dihasilkan tidak hanya bersifat *top-down*, serta memperhatikan aspirasi dan kondisi nyata di lapangan.



Diseminasi yang efektif akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan.

Selain itu, diseminasi SLUP dapat membantu mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi oleh desa-desa dalam pengelolaan lahan, sehingga solusi yang diusulkan lebih relevan dan aplikatif.

Dengan demikian, diseminasi SLUP di tingkat kabupaten tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Metode yang digunakan dalam tahap diseminasi ini adalah metode sosialisasi/presentasi dan diskusi melalui sesi tanya jawab dan pemberian kritik dan saran.

Dalam kegiatan ini, para pemangku kepentingan dapat bertanya dan juga menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait penggunaan lahan, serta berkolaborasi dalam merumuskan rencana yang sesuai dengan kondisi lokal.

Di samping itu, masukan dari pihak pemangku kebijakan juga sangat dibutuhkan dalam tahapan ini, untuk dapat menentukan tahapan selanjutnya dalam rangkaian internalisasi SLUP di Tingkat desa.

Partisipan dalam kegiatan diseminasi SLUP di Tingkat kabupaten merupakan para *stakeholder* yang sebelumnya telah diidentifikasi keterlibatannya dalam mendukung Pembangunan di tingkat desa.

Beberapa pemangku kebijakan yang diharapkan hadir dalam kegiatan diseminasi ini adalah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BAPPERIDA, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup.

Di beberapa Lokasi, pemangku kebijakan dapat berbeda yang perlu disesuaikan dengan konteks dan pola hubungan dan kerja yang telah dibangun oleh organisasi pendamping.

2. DISKUSI TERFOKUS TERKAIT DENGAN PENDEKATAN DALAM MENGINTERNALISASI SLUP DI TINGKAT DESA BERSAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Diskusi terfokus, atau *Focus Group Discussion* (FGD), memiliki peranan penting dalam menginternalisasi *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) di tingkat desa, terutama ketika melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.



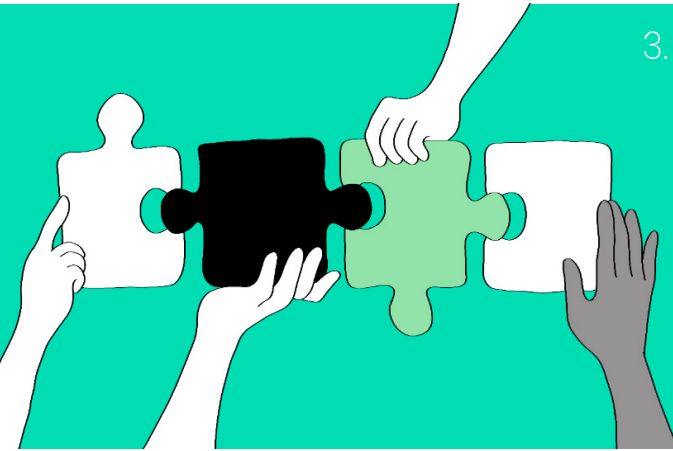
Metode ini memungkinkan pengumpulan informasi yang mendalam melalui diskusi terfokus yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Melalui diskusi terfokus, DPMD selaku leading sektor perencanaan di Tingkat desa dapat berbagi pandangan, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi terkait pendampingan perencanaan di Tingkat desa. Ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada tetapi juga dalam merumuskan solusi yang relevan dan aplikatif.

Dengan demikian, diskusi terfokus menjadi alat strategis dalam membangun sinergi dengan pemerintah serta meningkatkan efektivitas implementasi SLUP di tingkat desa.

Metode yang digunakan dalam tahapan ini adalah diskusi terfokus yang tidak dihadiri terlalu banyak partisipan, dan dilakukan beberapa kali dapat berupa diskusi santai di kantor.

Sedangkan partisipan dari proses ini adalah perwakilan dari organisasi pendamping dan juga perwakilan dari DPMD yang dapat berupa Kepala Dinas, Sekretaris, ataupun Kepala Bidang atau Kepala Seksi.



3. MELAKUKAN KOORDINASI INTENSIF DENGAN APARAT DESA UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI HASIL DAN REKOMENDASI SLUP DALAM RAPAT MUSREMBANGDESA

Melakukan koordinasi intensif dengan aparat desa untuk kegiatan sosialisasi hasil dan rekomendasi *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat.

Koordinasi ini juga dilakukan untuk memungkinkan organisasi pendamping atau bahkan aparat desa dapat diberikan kesempatan untuk menginternalisasi hasil serta rekomendasi SLUP, sehingga mereka dapat menyampaikannya dengan jelas dan akurat kepada warga desa.

Dengan melibatkan aparat desa dalam proses sosialisasi, mereka dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menjelaskan manfaat dari rencana penggunaan lahan yang berkelanjutan dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, koordinasi yang baik juga memastikan bahwa masukan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam rencana pembangunan.

Lebih jauh lagi, melalui koordinasi yang intensif, aparat desa dapat mengidentifikasi isu-isu lokal yang mungkin tidak terlihat dalam dokumen SLUP, sehingga rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan aplikatif.

Ini juga menciptakan rasa kepemilikan di kalangan masyarakat terhadap rencana pembangunan yang diusulkan, karena mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, koordinasi intensif ini tidak hanya memperkuat efektivitas sosialisasi tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara keseluruhan.

Metode yang digunakan pada tahapan ini adalah koordinasi horizontal yakni antara para aparat desa dengan organisasi pendamping, dan juga Masyarakat.

Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa berbagai pihak dapat bekerja sama, berbagi peran dan berbagi informasi.

Metode ini dapat dilakukan di kantor desa atau rumah warga desa dengan suasana santai.

Partisipan dalam proses ini adalah diantaranya perwakilan dari organisasi pendamping, kepala desa, aparat desa, dan juga perwakilan dari Masyarakat desa yang biasanya dihadiri oleh tokoh masyarakat.

4. INTEGRASI MUSREMBANGDESA DENGAN SOSIALISASI HASIL REKOMENDASI SLUP UNTUK PERENCANAAN DESA



Proses integrasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan sosialisasi hasil rekomendasi *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) sangat penting untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam tahap awal, pemerintah desa bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempersiapkan dokumen perencanaan yang mencakup hasil-hasil SLUP.

Selanjutnya, dalam rapat Musrenbangdesa, masyarakat diajak berdiskusi untuk memberikan masukan terhadap rekomendasi yang telah disusun.

Melalui forum ini, warga desa dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan aspirasi mereka, sehingga menghasilkan rencana yang lebih tepat sasaran.

Sosialisasi hasil SLUP dalam Musrenbangdesa juga memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membangun rasa kepemilikan terhadap rencana pembangunan yang dihasilkan.

Akhirnya, integrasi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah beberapa rekomendasi perencanaan yang tertuang dalam dokumen SLUP disepakati untuk dimasukkan ke dalam perencanaan desa.

Metode yang digunakan dalam tahapan ini adalah metode diskusi yang dilanjutkan dengan penyampaian usulan rekomendasi yang termuat dalam dokumen SLUP, hingga berakhir pada penetapan atau kesepakatan usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah Tingkat kecamatan.

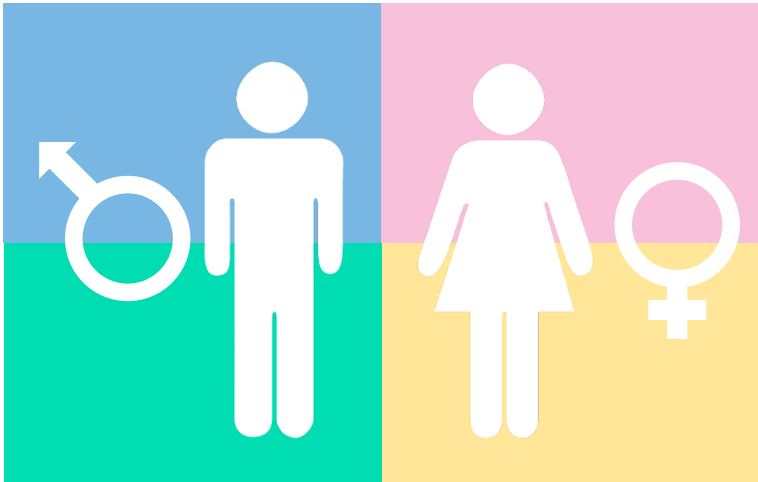
Partisipan dalam proses ini adalah diantaranya pemerintah desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan Musrenbangdesa.

Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi diskusi, mengumpulkan usulan, dan menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran vital, Tokoh masyarakat yang membawa pengaruh dan pengalaman mereka untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, kelompok-kelompok seperti kelompok tani dan peternak untuk memberikan perspektif penting terkait kebutuhan sektor pertanian dan peternakan, organisasi perempuan dan pemuda, masyarakat umum, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi pendamping desa yang turut terlibat dalam penyusunan SLUP.



**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
INTERNALISASI SLUP**



1. MELAKUKAN ANALISIS DOKUMEN SLUP DENGAN SUDUT PANDANG GENDER

Proses analisis dokumen *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) dengan sudut pandang gender sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan penggunaan lahan tidak hanya memperhatikan aspek teknis dan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan.

Dalam analisis ini, langkah pertama adalah mengidentifikasi data dan informasi yang relevan terkait penggunaan lahan yang berdampak pada perempuan dan laki-laki secara berbeda.

Misalnya, perempuan sering kali terlibat dalam kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga penting untuk memahami bagaimana kebijakan penggunaan lahan dapat mempengaruhi akses mereka terhadap sumber daya tersebut.



Metode yang digunakan dalam tahapan ini adalah *desk study* atau studi literature. Metode ini dilakukan melalui proses pembacaan dan analisis mendalam terhadap dokumen SLUP yang telah ada dan juga beberapa referensi pendukung.

2. DISKUSI BERSAMA TIM PENYUSUN SLUP

Proses internalisasi gender dalam dokumen *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) melibatkan langkah-langkah strategis yang penting, salah satunya adalah diskusi bersama tim penyusun SLUP.

Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dengan baik dalam setiap aspek perencanaan penggunaan lahan.

Dalam tahap ini, tim penyusun, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, berkumpul untuk membahas dan menganalisis data serta informasi terkait peran dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan lahan.

Selama diskusi, anggota tim akan mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh perempuan dalam konteks penggunaan lahan, seperti akses terbatas terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hambatan budaya yang mungkin menghalangi keterlibatan mereka.

Dengan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, diskusi ini menciptakan ruang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika gender di tingkat lokal.

Metode yang digunakan dalam tahapan ini adalah *desk study* atau studi *literature*. Metode ini dilakukan melalui proses pembacaan dan analisis mendalam terhadap dokumen SLUP yang telah ada dan juga beberapa referensi pendukung.



Partisipan dalam diskusi bersama ini adalah perwakilan dari tim penyusun dokumen SLUP, perwakilan desa, pendamping desa, organisasi pendamping desa.

Akhirnya, proses diskusi bersama tim penyusun SLUP menjadi langkah kunci dalam memastikan bahwa kebijakan penggunaan lahan yang dihasilkan tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan tetapi juga adil dan setara.

Dengan melibatkan perspektif gender secara aktif, dokumen SLUP dapat menciptakan dampak positif bagi pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. MENENTUKAN ASPEK GENDER YANG DAPAT DIINTERNALISASI KE DALAM ELEMEN SLUP

Menentukan aspek gender yang dapat diinternalisasi ke dalam elemen *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa perencanaan penggunaan lahan bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat.

Proses ini dimulai dengan melakukan analisis mendalam terhadap peran dan relasi gender yang ada dalam konteks penggunaan lahan di wilayah tersebut.

Dalam tahap ini, perlu diidentifikasi bagaimana peran perempuan dan laki-laki berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam, serta tantangan yang mereka hadapi.

Setelah itu, penyusunan indikator-indikator *gender* yang akan digunakan untuk mengevaluasi yang disesuaikan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam dokumen SLUP yang telah disusun. Dari hasil analisis dan diskusi, indikator-indikator yang disepakati adalah diantaranya sebagai berikut:

INDIKATOR INTERNALISASI SLUP BERBASIS GENDER				
KEPENDUDUKAN	PENGUSAANDAN PEMANFAATAN LAHAN	LIVELYHOOD	SEKTOR KELAPA SAWIT	PENILAIAN RISIKO BENCANA
Kepadatan Penduduk Agraris; Apakah petani yang dimaksud petani laki-laki atau petani perempuan?	Bagaimana peran perempuan dalam kearifan lokal yang ditemukan di Desa?	Adakah peran perempuan dalam mendukung penghidupan berkelanjutan?	Bagaimana peran perempuan dalam sektor kelapa sawit?	<p>Apa saja dampak yang dirasakan oleh perempuan saat terjadi bencana? (Geologi/ Hidrometeorologi, Penyakit tanaman/ Penebangan liar)</p>
Dapatkah dikeluarkan jumlah penduduk agraris perempuan?	Apa saja jenis pemanfaatan lahan oleh perempuan? Di mana saja ruang kelola perempuan? (Tidak terbatas hanya pada pekarangan)	Seperti apa peran perempuan dalam mendukung penghidupan berkelanjutan dalam <i>pentagon assets</i> ?	Seperti apa pembagian kerja laki-laki dan perempuan dalam praktik perkebunan kelapa sawit?	
	Adakah penguasaan lahan oleh perempuan?	Bagaimana peran perempuan/ posisi perempuan dalam strategi nafkah? (<i>on farm/off farm/non-farm</i>)		

Dengan menetapkan indikator yang jelas, proses evaluasi dapat dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa aspek gender terus diperhatikan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan.

Akhirnya, proses menentukan aspek gender yang dapat diinternalisasi ke dalam elemen SLUP tidak hanya berfungsi untuk memenuhi prinsip kesetaraan gender, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penggunaan lahan.

Dengan melibatkan perspektif gender secara aktif, dokumen SLUP dapat menciptakan dampak positif bagi pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Integrasi aspek gender ini menjadi langkah strategis menuju pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua anggota masyarakat.

Metode yang digunakan pada tahapan ini adalah diskusi terfokus yang menguraikan isi dokumen SLUP, BAB per BAB, lalu didiskusikan bersama terkait dengan isu gender yang dapat diinternalisasikan.

Partisipan dalam diskusi Bersama ini adalah perwakilan dari tim penyusun dokumen SLUP, pendamping desa, organisasi pendamping desa, dan *gender expert*.

4. MELAKUKAN FGD DI KAMPUNG UNTUK MENGUMPULKAN DATA GENDER SESUAI DENGAN ELEMEN DALAM SLUP

Proses internalisasi gender dalam dokumen *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) dilanjutkan dengan langkah penting melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di kampung untuk mengumpulkan data gender yang sesuai dengan elemen-elemen dalam SLUP yang telah digambarkan di sebelumnya.

Indikator-indikator tersebut merupakan dasar dalam pelaksanaan FGD untuk penggalian data, namun tentu saja indikator tersebut tidak terbatas dan dapat dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan di Lokasi yang pastinya berbeda antara satu dengan yang lainnya.

FGD ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai peran, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki dalam konteks penggunaan lahan di komunitas tersebut.

Proses internalisasi gender dalam dokumen *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) dilanjutkan dengan langkah penting melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di kampung untuk mengumpulkan data gender yang sesuai dengan elemen-elemen dalam SLUP yang telah digambarkan di sebelumnya.



Indikator-indikator tersebut merupakan dasar dalam pelaksanaan FGD untuk penggalian data, namun tentu saja indikator tersebut tidak terbatas dan dapat dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan di Lokasi yang pastinya berbeda antara satu dengan yang lainnya.

FGD ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai peran, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki dalam konteks penggunaan lahan di komunitas tersebut.

Dalam pelaksanaan FGD, berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, tokoh adat, dan perwakilan organisasi perempuan, diundang untuk berpartisipasi.

Diskusi ini dipandu oleh fasilitator yang berpengalaman dalam isu-isu gender, sehingga peserta dapat dengan bebas berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Melalui sesi interaktif ini, peserta didorong untuk mengidentifikasi aspek-aspek gender yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan lahan, seperti akses terhadap sumber daya, hak atas tanah, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Diskusi ini dipandu oleh fasilitator yang berpengalaman dalam isu-isu gender, sehingga peserta dapat dengan bebas berbagi pandangan dan pengalaman mereka.

Melalui sesi interaktif ini, peserta didorong untuk mengidentifikasi aspek-aspek gender yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan lahan, seperti akses terhadap sumber daya, hak atas tanah, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Hasil dari FGD ini sangat berharga, karena memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender.

Selain itu, diskusi ini juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan melibatkan suara masyarakat secara langsung, proses ini memastikan bahwa dokumen SLUP tidak hanya mencerminkan kebijakan dari atas tetapi juga aspirasi dan kebutuhan nyata dari komunitas.

Akhirnya, FGD di kampung menjadi langkah strategis dalam menginternalisasi gender ke dalam SLUP, menciptakan dasar yang kuat untuk perencanaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan tetapi juga memberdayakan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sumber daya alam di desa mereka.

Metode yang digunakan dalam tahapan ini adalah metode diskusi terfokus atau yang biasa disebut dengan FGD.

Dalam tahapan ini, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing akan mendiskusikan beberapa pertanyaan inti.

Dalam proses ini, fasilitator dapat memilih menggunakan pendekatan *twintrack*, apakah memberi ruang khusus untuk peserta Perempuan saja atau menggabungkan peserta Perempuan dan laki-laki.

Pendekatan ini dapat disesuaikan dengan konteks Lokasi wilayah atau desa yang menjadi target Lokasi.

Partisipan dalam diskusi Bersama ini adalah perwakilan dari pemerintah desa, warga Masyarakat desa baik Perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang sama (jika menggunakan pendekatan gabungan) atau warga desa Perempuan yang terdiri dari IRT, petani Perempuan, Perempuan kepala rumah tangga, Perempuan pekerja *non-farm*, Perempuan aparat desa, tim penyusun dokumen SLUP, organisasi pendamping desa, dan *gender expert*.

5. MEMBUAT LAPORAN DAN REKOMENDASI INTERNALISASI ASPEK GENDER DALAM PENYUSUNAN SLUP

Proses selanjutnya dalam internalisasi *gender* dalam dokumen *Sustainable Land Use Planning* (SLUP) adalah membuat laporan dan rekomendasi terkait internalisasi aspek *gender* dalam penyusunan SLUP.

Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua temuan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya dapat terdokumentasi dengan baik dan diintegrasikan ke dalam kebijakan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Laporan ini dimulai dengan merangkum hasil dari diskusi, analisis data gender, dan masukan yang diperoleh dari *Focus Group Discussion* (FGD) di kampung.

Dalam laporan tersebut, peran dan kontribusi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam serta tantangan yang mereka hadapi harus terekam dengan baik.

Informasi ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana gender mempengaruhi akses dan kontrol terhadap lahan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, laporan ini juga harus mencakup rekomendasi konkret untuk menginternalisasi aspek gender ke dalam elemen-elemen SLUP.

Rekomendasi tersebut bisa meliputi langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan lahan, memastikan akses yang setara terhadap sumber daya, serta menciptakan mekanisme untuk mendukung hak-hak perempuan atas tanah. Selain itu, penting juga untuk menyarankan indikator-indikator gender yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi SLUP di masa depan.





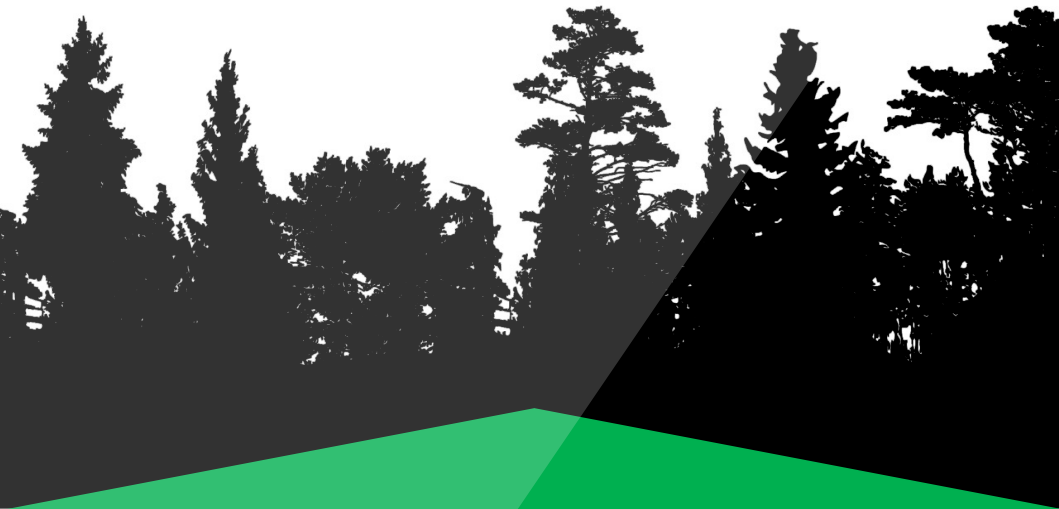
DAFTAR PUSTAKA

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 2015. *Factsheet: Sustainable Land Use Planning (SLUP)*. (<https://jkpp.org/factsheet-sustainable-land-use-planning-slup/>, diakses : 25 November 2024).

Kinasih, Diah Ayu Suci. 2023. *Desa Nusantara berbasis Sustainable land use planning (SLUP)*. (<https://diahask.com/desa-nusantara/>, diakses : 24 November 2025).

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 2015. *Beginilah SLUP, Bentuk Partisipasi Masyarakat Mengelola Wilayahnya*. (<https://jkpp.org/beginilah-slup-bentuk-partisipasi-masyarakat-mengelola-wilayahnya/>, diakses : 25 November 2024).

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 2023. *Perencanaan tata guna lahan desa Tambakua*. Tidak dipublikasi.



PENERBIT
RUMAH BUNTI
JL. PANCIJIMA POLIM LORONG PDAM
PERUMAHAN MARCAH AYU BLOK F NOMOR 6
KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA

ISBN : 978-623-6760-27-7



9 786236 760277